

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2012:110). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah.

Suwardjono (2012:101) dalam menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian

tujuan ekonomik dan sosial negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelayanan publik, juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan daerah. Selanjutnya pada KKAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah. Karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dijelaskan dalam SAP Bagian KKAP Lampiran I (35-40), antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan

dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajiannya. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai (KKAP, paragraf 22).

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan sumber daya manusia yang baik juga. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang

menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. (Yudianta dan Erawati, 2012).

Dalam suatu organisasi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting, karena yang menjalankan serta mengelola suatu organisasi adalah sumber daya manusianya. Untuk itu, diperlukanlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. (Rahmadani, 2015).

2.1.3 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Yudianta dan Erawati 2014).

Menurut Jogiyanto (1995:7), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas. Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat

konsisten serta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia (Rahmadani, 2015).

2.1.4 Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data dapat dipercaya. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian Intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah

untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi.

Menurut Noviyanti (2004 dalam Winidyaningrum *et al* 2010), pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidak-akuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten. Selain itu menurut Indriasari *et al* (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan system teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1992) adalah:
“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide

reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. *Effectiveness and efficiency of operations*
2. *Reliability of financial reporting*
3. *Compliance with applicable laws and regulations.”*

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel dan Teknik Analisis	Hasil penelitian
1.	I Gede Agus Yudianta dan Ni Made Adi Erawati (2012)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: SDM, Teknologi Informasi, Sistem pengendalian intern Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan Teknik analisis: Regresi berganda	SDM, Teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.	I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi	Variabel Independen: Sumber Daya Manusia, Penerapan	sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem

	Wayan Putra (2014)	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar)	Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi SAP Variabel Dependen : Kualitas Informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Teknik analisis: Regresi berganda	pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan.
3.	Dyah Puri Surastiiyani dan Bestari Dwi Handayani (2015)	Analisi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informais Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: SDM, PTI, SPI Variabel Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teknik analisis: Regresi berganda	Sumber daya manusia dan sistem pengendalin intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas

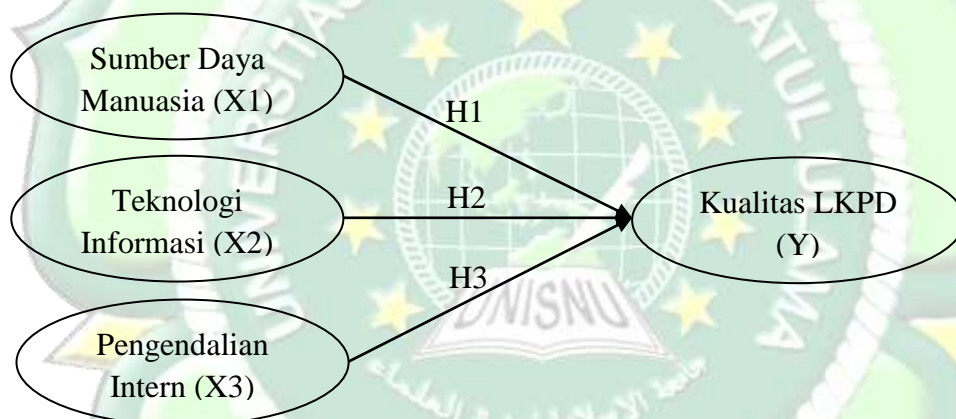
				informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4.	Suci Rahmadani (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Ankkuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)	<p>Variabel Independen: SDM, Penerapan SAKD, PTI, Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Teknik analisis : Regresi berganda</p>	SDM, Penerapan SAKD, PTI, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5.	Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<p>Variabel Independen: SDM, Sistem pemhendalian Intern, dan Pemahaman SAP</p> <p>Variabel Dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>Tehnik analisis :</p>	SDM, Sistem pemhendalian Intern, dan Pemahaman SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

			Regresi berganda	
--	--	--	------------------	--

Sumber : Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014), Surastiani dan Handayani (2015), Rahmadani (2015), Kiranayanti dan Erawati (2016)

2.3 Kerangka Penelitian Teoritis (KPT)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu pelaporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, teknologi Informasi, pengendalian intern. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan dengan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi

yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian di bidang akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya mejadi buruk (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Jadi, Semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014), Surastiani (2015), Rahmadani (2015), Kiranayanti dan Erawati (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.2 Hubungan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelolah dan mendayagunakan informasi

keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dari pemanfaatan teknologi informasi maka semakin cepat dalam proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu kehilangan nilai informasi (Maksyur, 2015)

Hasil penelitian yang mendukung tentang teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Yudianta dan Erawati (2012), Mahaputra dan Putra (2014), Surastiani dan Handayani (2015), Rahmadani (2015) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Hubungan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian Intern memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, obyektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014). Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan

keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan informasi laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Pemerintah).

Yudianta dan Erawati (2012) Pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Mahaputra dan Putra (2014), Surastiani dan Handayani (2015), Rahmadani (2015), Kiranayanti dan Erawati (2016) menemukan hasil bahwa, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

